

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada triwulan 4 tahun 2025, inflasi di Kabupaten Wonosobo relatif terkendali dengan tren kenaikan harga yang didorong oleh komoditas pangan, di mana inflasi month-to-month (m-to-m) tercatat 0,44% pada Oktober dan 0,59% pada Desember, sementara year-on-year (y-on-y) berada di kisaran 2,75-2,76%. Indeks Harga Konsumen (IHK) stabil di level 110,96-111,88, mencerminkan stabilitas harga secara keseluruhan meskipun kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,25% pada Oktober, terutama akibat kenaikan harga cabai merah/rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, serta sawi hijau.

Selain itu, harga barang lain seperti emas perhiasan turut berkontribusi signifikan (0,17%), sementara kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga (andil 0,01%), transportasi, kesehatan, dan perawatan pribadi/jasa lain mengalami kenaikan ringan, walaupun deflasi tercatat di sektor informasi, komunikasi, serta jasa keuangan (-0,58%). Komoditas kebutuhan pokok ini menjadi sorotan utama, dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wonosobo memantau pasar tradisional untuk menjaga distribusi dan stabilitas pasokan.

Ke depan, risiko inflasi dipicu oleh volatilitas harga hortikultura seperti cabai, terutama menjelang akhir tahun atau musim liburan yang meningkatkan permintaan bahan pokok, sehingga langkah antisipasi melalui penguatan koordinasi pasar dan stok buffer menjadi krusial untuk mencegah lonjakan lebih lanjut.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi di Kabupaten Wonosobo pada triwulan 4 tahun 2025 menghadapi sejumlah permasalahan struktural yang menghambat efektivitas upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Permasalahan utama mencakup kurangnya sinergi optimal antar-OPD dan stakeholder terkait, yang menyebabkan koordinasi distribusi barang kebutuhan pokok kurang responsif terhadap fluktuasi harga. Disparitas harga antarwilayah menjadi tantangan serius akibat distribusi pasokan yang belum merata, terutama di pasar tradisional pedalaman yang sulit dijangkau logistik.

Selain itu, ketergantungan tinggi pada pasokan hortikultura musiman seperti cabai merah/rawit membuat inflasi rentan terhadap gangguan cuaca, minimnya diversifikasi sumber pasok, dan keterbatasan stok buffer di tingkat pasar induk. Pengawasan terhadap pedagang masih minim intensif, memungkinkan praktik spekulasi harga saat permintaan melonjak menjelang akhir tahun, ditambah frekuensi rapat koordinasi TPID yang belum konsisten untuk operasi pasar preventif. Tantangan ini diperparah oleh kurangnya data real-time distribusi yang akurat, sehingga respons kebijakan sering terlambat terhadap indikator dini kenaikan harga.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi secara intensif pada triwulan 4 2025 dengan fokus pemantauan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok di pasar utama seperti Pasar Induk, Pasar Kertek, dan Pasar Garung. Langkah strategis utama mencakup penyelenggaraan Gerakan Pasar Murah (GPM) bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM untuk menekan lonjakan harga komoditas volatile seperti cabai, serta operasi pasar preventif guna menstabilkan pasokan.

Koordinasi antar-OPD dan stakeholder diperkuat melalui rapat rutin TPID, termasuk kolaborasi antar-daerah untuk mengoptimalkan distribusi hortikultura dari wilayah penghasil, monitoring ketersediaan BBM serta LPG, dan penguatan stok buffer di pasar tradisional. Kebijakan ini juga melibatkan pengawasan ketat terhadap pedagang untuk mencegah spekulasi harga menjelang akhir tahun, dengan komitmen bersama menjaga ketersediaan barang esensial pada harga terjangkau.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wonosobo pada triwulan 4 2025 dinilai efektif secara keseluruhan karena berhasil menjaga inflasi year-on-year di kisaran 2,75-2,76% dan month-to-month 0,44-0,59%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya seperti Juli 2025 (2,36%). Gerakan Pasar Murah (GPM), operasi pasar, dan pemantauan harga volatile seperti cabai berhasil menekan lonjakan, terbukti dari stabilitas IHK 110,96-111,88 meskipun ada kenaikan komoditas pangan.

Koordinasi rapat rutin TPID dan kolaborasi antar-OPD memperkuat distribusi stok buffer, yang berkontribusi pada penurunan disparitas harga antarwilayah dan pencegahan spekulasi pedagang menjelang akhir tahun. Namun, evaluasi menunjukkan kelemahan dalam responsivitas terhadap gangguan cuaca hortikultura dan minimnya data real-time, sehingga inflasi makanan tetap dominan (andil 0,25%), serta kebutuhan strategi jangka panjang seperti diversifikasi pasok untuk mengurangi ketergantungan musiman. Secara keseluruhan, kebijakan ini berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah di bawah target nasional, tetapi memerlukan peningkatan monitoring digital dan kolaborasi lintas-daerah untuk optimalisasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk mengoptimalkan pengendalian inflasi di Kabupaten Wonosobo, disarankan memperkuat sinergi antar-OPD dan stakeholder melalui rapat koordinasi TPID yang lebih rutin dan terstruktur, termasuk kolaborasi lintas-daerah untuk distribusi hortikultura guna mengurangi disparitas harga antarwilayah. Tingkatkan stok buffer komoditas volatile seperti cabai merah/rawit melalui penyediaan sarana penyimpanan pasca-panen dan program urban farming di lahan nonsentra, serta perluas Gerakan Pasar Murah (GPM) dan operasi pasar preventif secara berkala.

Implementasikan pengawasan intensif berbasis data real-time terhadap pedagang pasar tradisional untuk mencegah spekulasi, didukung sidak rutin dan platform monitoring digital harga Bapokting. Diversifikasi sumber pasok pangan dengan mendorong produksi lokal melalui tanam pekarangan dan kemitraan petani, serta perkuat komunikasi publik untuk perilaku konsumsi bijak guna menjaga stabilitas permintaan saat musim liburan. Kebijakan

jangka panjang seperti penguatan infrastruktur logistik dan antisipasi gangguan cuaca akan meminimalkan risiko musiman, menargetkan inflasi di bawah 2,5% pada 2026.